

# Pemimpin Pendidikan dan "Investment in Human Capital"

Oleh:  
**Nadzi Akbar**  
Dosen IAIN Antasari, Mahasiswa S2  
Manajemen Pendidikan UM Malang

*Dana minimal 20 % dari APBN atau APBD yang digelanturkan negara tidak mampu menjamin pendidikan dasar sepenuhnya gratis. Dengan alasan memperbaiki jalan, mushalla, masjid, kanten sekolah, dan penambahan fasilitas lain memerlukan dana yang tidak sedikit yang tentunya akan dibebankan kepada siswa. Apalagi untuk tingkat SMA sederajat dan Perguruan Tinggi akan lebih banyak lagi dana yang keluar.*

**P**ARADIGMA bahwa pendidikan itu mahal, pendidikan itu penuh pengorbanan, pendidikan itu perlu perhatian semua pihak, dan pendidikan sebagai Investment in Human Capital. Itulah yang tertanam dalam benak masyarakat, paradigma tersebut terbukti sangat signifikan dengan realita di lapangan saat ini. Sejak bulan Juni dan Juli orangtua yang memiliki anak mau masuk PAUD, TK, sampai perguruan wajib mempersiapkan dana, dengan rincian yang jelas. Bahkan harus mempersiapkan dana tak terduga yang jumlahnya juga tak terduga jumlahnya, hanya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Padahal semua warga-negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang dijamin oleh Negara dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1.

Dengan paradigma tersebut di atas, Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah dapat memainkan peran apakah memilih sebagai pemimpin atau manager pendidikan. Karena masyarakatnya sudah pasrah dengan paradigma tersebut. Berapapun biaya yang dianggarkan oleh pihak lembaga pendidikan orangtua pasti akan berusaha untuk membayarnya demi pendidikan anak-anaknya.

Dana minimal 20 % dari APBN atau APBD yang digelanturkan negara tidak mampu menjamin pendidikan dasar sepenuhnya gratis. Dengan alasan memperbaiki jalan, mushalla, masjid, kanten sekolah, dan penambahan fasilitas lain memerlukan dana yang tidak sedikit yang tentunya akan dibebankan kepada siswa. Apalagi untuk tingkat SMA sederajat dan Perguruan Tinggi akan lebih banyak lagi dana yang keluar.

Dalam rangka mewujudkan pasal 31 ayat 1 UUD RI 1945, Kepala Sekolah harus lebih mengutamakan perannya sebagai Pemimpin Pendidikan, dengan menomor duakan perannya sebagai manager sekolah. Seorang pemimpin itu adalah seorang pejuang, pemimpin itu mempunyai tujuan yang jelas yaitu membawa kepada kemaslahatan bersama bukan menyensasikan. Semangat pemimpin adalah semangat melindungi, empati dan bertanggung jawab terhadap kelancaran, kesuksesan dan bahkan kesejahteraan orang ada dibawah kepemimpinannya.

Pemimpin berbeda dengan manajer, tugas manajer adalah bagaimana membawa kemajuan organisasi dengan cara apapun. Kemaslahatan bersama itu hanya sebagai salah satu alat untuk kemajuan organisasi lebih cenderung pada pencitraan. Tujuan akhirnya adalah kemajuan organi-

sasi bahkan dapat melenceng hanya untuk kepentingan manager. Pada akhirnya dunia pendidikan menjadi lahan bisnis, yang mengutamakan nir laba.

Dalam hal ini kita semua jangan keliru memandang "Investment in human capital" yang pada akhirnya mengahajar habis-habisan siswa dan orangtua siswa. Investment in human capital adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mengeluarkan modal sehingga akan mendatangkan manfaat yang lebih besar dikemudian hari. secara filosofis peningkatan sumber daya manusia itu meliputi dua aspek yaitu pertama aspek kemampuan berupa keterampilan dan wawasan ilmu pengetahuan, kedua aspek kemanusiaannya aspek berupa kecerdasan emosional, spiritual dan kecerdasan adversity.

Dengan kedua aspek tersebut manusia tidak hanya memiliki penghasilan atau meningkat penghasilannya akan tetapi juga meningkat derajat kemanusiaannya, sehingga semakin tinggi pendidikannya semakin tinggi derajatnya, akan ada perbedaan antara orang yang berpendidikan tinggi dengan yang berpendidikan rendah.

"Investment in human capital" dalam konteks konsep filosofi pendidikan harus kembali kepada tujuan pendidikan itu sendiri yaitu kembali pada tujuan pendidikan nasional yang didasari oleh Pancasila yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Secara konseptual "Investment in human capital" adalah salah satu cara atau pendekatan untuk pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Negara kita Indonesia sebagaimana tersebut di atas adalah membentuk manusia Indonesia secara konprehensif yaitu membentuk manusia yang seutuhnya. Dalam implikasinya "Investment in human capital" jangan sampai terjerumus kepada pembentukan manusia yang pragmatis, kapitalis dan materialis segala sesuatu diukur dengan untung rugi secara materi yang menghilangkan sisi kemanusiaannya.

Derajat kemanusiaan yang berpendidikan tinggi tidak bisa diukur dengan materi, derajat kemanusiaan itu akan membawa kepada kemaslahatan umat manusia secara luas dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Secara konsep-

tual Landasan ekonomi "Investment in human capital" sangat urgen bagi efektifitas pelaksanaan proses pendidikan, tanpa dukungan ekonomi proses pendidikan tidak bisa berjalan dengan lancar. Dukungan ekonomi dalam proses pendidikan memiliki dua implikasi pada pokok, yaitu secara prinsipil dan secara material.

Secara prinsipil peran tersebut meliputi prinsip-prinsip ekonomi yang dapat diaplikasikan dalam implementasi pendidikan, sementara itu secara material peran ekonomi berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan proses pendidikan. Implikasi akhirnya antara pendidikan dan ekonomi menjadi hubungan yang saling menguntungkan. "Investment in human capital" mampu mendorong pendidikan berjalan secara efektif dan efisien sementara hasil pendidikan akan menciptakan manusia yang memiliki kualitas.

Dengan dasar UUD RI 1945, Investment in Human Capital seharusnya dibebankan kepada Negara dan dunia usaha bukan kepada siswa dan orangtua siswa. Pada konteks ini fungsi dari Pemimpin Pendidikan dibantu oleh Komite Sekolah adalah membuat perencanaan yang matang, membuat argumen pembiayaan pendidikan yang disalurkan kepada Pemerintah dan Korporasi, sebab disinyalir ketika Negara menggelanturkan sejumlah dana untuk pendidikan tetapi pihak lembaga pendidikan tidak siap menggunaannya.

Dengan menghilangkan beban biaya pendidikan pada masyarakat, akan berdampak kepada pemilihan jurusan pendidikan yang sesuai dengan diri siswa. Outcome akan bekerja benar-benar penuh pengabdian bukan mencari hanya untung untuk kembali modal. Hal itu akan menekan korupsi dan pungli, melahirkan anak-anak bangsa yang berkemampuan teknis, intelek, dan berperadaban sejati bukan abal-abal.

Maksimalkan peran pemerintah dalam memajukan pendidikan. Peran pemerintah dalam hal ini dengan niat yang lurus bukan karena kepentingan pribadi atau golongan. Usahakan dana yang disalurkan untuk pendidikan terhindar dari penyimpangan, lakukan pengawasan terhadap penggunaan pendidikan.

Maksimalkan peran para ahli pendidikan, penyelenggara pendidikan dan praktisi pendidikan. Peran memajukan pendidikan dalam hal ini adalah melaksanakannya dengan sebenarnya tugas yang di emban. Hindari niat-niat untuk melakukan korupsi, penyalahgunaan dana dan upaya-upaya pungli. Jika elemen-elemen tersebut melaksanakan perannya secara maksimal dapat dipastikan masyarakat dengan sukarela berkorban untuk kemajuan pendidikan. (\*)